

PELAKSANAAN PROGRAM KEWIRAUSAHAAN PADA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT DI KAB. SLEMAN

Aji Pranoto¹

¹Jurusan Teknik Mesin, Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta

Masuk: 12 Maret 2013, revisi masuk: 6 Juni 2013, diterima: 15 Juli 2013

ABSTRAC

Unemployment and poverty in Yogyakarta, especially in the districts of Sleman both rural and urban is still high. Efforts have been taken by the government with the entrepreneurship education programs (PKM). The program is the Course Rural Entrepreneurial (KWD) and Course Entrepreneurial City (KWK). The purpose of the research is to figure out the implementation of administration, process, achievement of results, follow-up mentoring business, and the factors supporting and inhibiting the implementation of the program (KWD) and (KWK) at the Community Learning Center (PKBM) in Sleman. Data are collected by questionnaires, interviews and documentation. The data obtained are then analyzed using descriptive method. Results show that the average value of implementation of the program administration KWD & KWK, implementation process, and follow-up mentoring are 2.331, 2.406, and 2.338 respectively, hence categorized enough. Meanwhile, an achievement of objectives in average of 2,176 and categorized is less. Supporting factors are the aspect of understanding, ability and experience in conducting, has the electronic media (computer) 70% and a good enough office space, as well as funding (block grants) from the government. Limiting factors are the reliance on a particular board member; un-expert tutor, low motivation learners, and nonproductive citizens. Furthermore, the limitations are (PKBM) which insufficient Internet connection and guide books, lack of funds to open a business stimulant, tutor small honorarium, and the difficulty of finding an external funding sources.

Keywords: *Implementation, Entrepreneurship Program, Community Learning Center*

INTISARI

Pengangguran dan kemiskinan di Yogyakarta, khususnya di kabupaten Sleman baik di pedesaan dan perkotaan masih tinggi. Upaya yang ditempuh pemerintah dengan menyelenggarakan program Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat (PKM). Program tersebut adalah Kursus Wirausaha Desa (KWD) dan Kursus Wirausaha Kota (KWK). Tujuan penelitian untuk mengungkap pelaksanaan administrasi, proses/pelaksanaan, pencapaian hasil, tindak lanjut pendampingan usaha, dan faktor-faktor pendukung & penghambat pelaksanaan program KWD dan KWK pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Sleman. Pengumpulan data dengan kuesioner, wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis dengan metode deskriptif. Hasil menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan administrasi program KWD dan KWK rerata 2,331 kategori cukup. Pelaksanaan/proses rerata 2,406 kategori cukup. Pencapaian tujuan rerata 2,176 kategori kurang. Tindak lanjut pendampingan rerata 2,338 kategori cukup. Faktor pendukung adalah aspek pemahaman, kemampuan dan pengalaman menyelenggarakan, punya media elektronik (*computer*) 70% dan ruangan kantor yang cukup baik, serta dana (*block grant*) dari pemerintah. Faktor penghambat adalah ketergantungan pada pengurus tertentu, tutor kurang menguasai materi, motivasi rendah warga belajar, serta warga tidak berusia produktif, PKBM yang belum punya jaringan internet dan buku-buku panduan, minimnya dana stimulan untuk membuka usaha, honor tutor yang kecil, dan sulitnya mencari sumber dana dari tempat lain juga merupakan faktor penghambat.

Kata kunci: Pelaksanaan, Program Kewirausahaan, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

¹aji_pranoto@akprind.ac.id

PENDAHULUAN

Jumlah pengangguran di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dari tahun ke tahun terus meningkat. Berdasarkan hasil survei angkatan kerja nasional (Sakernas) yang dilakukan Februari 2010 diketahui bahwa jumlah angkatan kerja di DIY mencapai 2,07 juta orang. Jumlah itu bertambah sekitar 50 ribu orang dibanding angkatan kerja pada Agustus 2009 yang sebanyak 2,02 juta orang. Berdasarkan data yang dipaparkan bahwa pengangguran dan kemiskinan di provinsi DIY khususnya di kabupaten Sleman, baik yang ada di pedesaan dan perkotaan masih cukup tinggi, untuk mengendalikan masalah tersebut diperlukan upaya-upaya mengurangi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di pedesaan. Upaya yang ditempuh pemerintah melalui Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan (*Ditbansuslat*) Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal (Moerdiyanto, 2010) dengan melalui menyelenggarakan program kursus dan pelatihan pendidikan kewirausahaan masyarakat (PKM). Program tersebut antara lain Kursus Wirausaha Desa (KWD), Kursus Wirausaha Kota (KWK) (*Ditbansuslat*, 2010).

Pelaksanaan program KWD dan KWK sudah dilakukan oleh Ditbansuslat selama ini, dengan pendekatan 3 in 1 yaitu kompetensi, sertifikasi dan penempatan kerja (Moerdiyanto, 2007). Program ini saat diluncurkan memang sedikit memberi harapan untuk bisa mengentaskan pengangguran dan kemiskinan. Namun setelah dicermati dari indikator keberhasilan programnya hanya menekankan pada peserta/warga belajar berhasil mendapatkan pekerjaan (*workers*) dan membuka usaha kecil (*small bisnis*). Hal ini masih tertumpu pada pembelajaran keterampilan (*skills*), belum menyentuh kepada aspek jiwa kewirausahaan. Padahal jiwa kewirausahaan menyebabkan peserta/warga belajar memiliki rasa percaya diri yang besar dan tidak mudah terombang ambing.

Jiwa kewirausahaan hanya bisa tumbuh dan berkembang secara optimal dalam dunia usaha. Oleh karena itu, dunia usaha dari yang paling sederhana

dan kecil hingga yang berskala besar merupakan laboratorium yang handal yang dapat dijadikan proses penumbuh kembang jiwa kewirausahaan. Substansi jiwa kewirausahaan pada akhirnya bertumpu pada satu kata kunci yaitu keberanian mengambil keputusan dan sekaligus menanggung risiko. Sebab tidak sedikit orang yang berkemauan keras, punya inisiatif dan berpandangan luas tetapi tidak banyak yang berani menanggung risiko.

Sejak tahun 2007 program KWD dan KWK di kabupaten Sleman yang dilakukan oleh PKBM belum cukup informasi yang menyatakan bahwa program ini berhasil untuk mendidik warga belajar. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana efektivitas program KWD dan KWK serta sejauh mana keberhasilan program ini berhasil dalam mengembangkan kemampuan berwirausaha.- Oleh karena itu diperlukan evaluasi program KWD dan KWK ini. Sehingga dana yang banyak diberikan oleh pemerintah dapat mencapai sasaran dan target yang diharapkan.

Berdasarkan paparan di atas, maka perumusan permasalahan adalah bagaimana administrasi program KWD dan KWK pada PKBM di Kabupaten Sleman? bagaimana pelaksanaan program? bagaimanakah pencapaian hasil? Bagaimanakah tindak lanjut pendampingan usaha? faktor-faktor apa saja sebagai pendukung pelaksanaan program? faktor apa saja sebagai penghambat pelaksanaan program KWD dan KWK pada PKBM di Kabupaten Sleman ?

Manfaat menjadi masukan bagi Direktorat jenderal pendidikan nonformal informal (Moerdiyanto, 2010) khususnya Direktorat pembinaan kursus dan kelembagaan (Ditbansuslat) pusat. Bagi pihak-pihak yang terkait terutama PKBM supaya dapat sebagai masukan dan upaya peningkatan mutu pendidikan secara umum dan khususnya pendidikan *nonformal informal*.

METODE

Menurut Slamet PH (2010:21) Kewirausahaan adalah kegiatan kreatif, inovatif, dan terorganisir dalam menciptakan produk baru dan pasar baru yang

disertai keberanian mengambil risiko atas hasil ciptaannya dan melaksanakannya secara terbaik (ulet, gigih, tekun, progresif, pantang menyerah) sehingga nilai tambah yang diharapkan dapat dicapai. Hasil kegiatan kreatif adalah daya cipta produk baru dan pasar baru, hasil kegiatan inovatif adalah pengembangan dari produk dan pasar yang ada ke yang baru.

Pendapat di atas bahwa kewirausahaan tidak cukup hanya menemukan produk baru, tetapi juga harus mampu memasarkan produk/ide barunya ke dunia nyata (bisnis/non bisnis) dan ini memerlukan kemampuan memasarkan (kemampuan berbisnis). Kegiatan kewirausahaan juga melibatkan pengambilan risiko karena produk/ide baru yang dihasilkan belum jelas masa depannya, apakah akan laku atau tidak yaitu apakah konsumen akan menerimanya walaupun produk barunya itu lebih bagus dari yang ada. Jadi, seorang wirausahawan memiliki kemampuan untuk memikirkan sesuatu yang belum pernah dipikirkan oleh orang lain (prinsip kreatif dan inovatif) yang hasilnya adalah buah pikiran yang asli dan bukannya replikasi, baru dan bukannya meniru, memberi kontribusi dan bukannya membuat rugi, dan kemampuan memasarkan serta kemampuan melaksanakannya secara konsekuen.

Karakteristik seorang wirausahawan yang berhasil (*successful entrepreneurs*), adalah sebagai berikut: komitmen, determinasi, dan ketabahan hati secara total, bergerak maju untuk mencapai tujuan dan tumbuh, peluang dan orientasi pada tujuan, mengambil inisiatif dan tanggung jawab pribadi, gigih terhadap pemecahan masalah, *realism* dan mempunyai *sense of humor*, mencari dan memakai umpan balik (*feedback*), adanya tempat kontrol internal, mengambil risiko yang telah dipehitungkan untuk mencari risiko, mempunyai keinginan yang rendah untuk mendapatkan status dan kekuasaan, integritas dan dipercaya.

Pendidikan dan Latihan Kewirausahaan adalah Pendidikan yang berorientasi *life skills*, semua tuntutan tersebut terintegrasi dalam kecakapan

Generik (*Psycho Sosial*) meliputi kecakapan sosial dan personal, antara lain berperilaku hidup sehat, kecakapan bekerjasama, kecakapan berkomunikasi, kecakapan berpikir secara kritis. Kecakapan Spesifik antara lain terdiri dari kecakapan akademik dan Vokasional, dan Nilai-nilai Sikap (*Value and Attitude*) antara lain terdiri dari disiplin, bertanggung jawab, *respect* terhadap orang lain yang targetnya adalah usia anak sekolah dan pemuda, sehingga *life skills* diharapkan mampu membentuk peserta didik dengan berbagai keterampilan dan sikap dasar yang erat hubungannya dengan pengembangan pribadi yang peduli pada kesehatan baik fisik, mental maupun sosial serta entrepreneurship. Untuk itu *life skills* perlu diberikan sedini mungkin, sehingga sikap dan tindakan ataupun perilaku hidup sehat menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, maka pendidikan berorientasi *life skills* harus diberikan secara bertahap dan sistematis yaitu dimulai dari peserta didik pada jenjang pendidikan terendah.

Program Kursus Wirausaha Desa (KWD) adalah program pelayanan pendidikan dan pelatihan bagi penduduk kurang beruntung yang memiliki keinginan untuk memperoleh keterampilan sebagai bekal untuk bekerja di dalam negeri atau membuka usaha mandiri. Jenis keterampilan yang dikembangkan berorientasi pada keterampilan jasa atau produk (terutama produk) sesuai potensi sumberdaya yang ada di pedesaan. Pendekatan yang digunakan dalam kpp adalah 3 in 1, yaitu: (1) pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, (2) Uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi (3) Pendampingan dalam penegembangan usaha mandiri (Ditbansuslat : 2010)

Lebih lanjut dijelaskan bahwa KWD dan KWK adalah Program pelayanan pendidikan dan pelatihan bagi penduduk kurang beruntung yang memiliki keinginan untuk memperoleh keterampilan sebagai bekal untuk bekerja di dalam negeri atau membuka usaha mandiri. Jenis keterampilan yang dikembangkan berorientasi pada keterampilan jasa atau produk (terutama jasa) sesuai kebutuhan pasar kerja

dalam negeri baik spectrum pedesaan maupun perkotaan. Keterampilan yang diselenggarakan dalam program KWK dan KWD adalah jenis keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan/atau wirausaha yang ada di pedesaan. Kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan harus sesuai kebutuhan masyarakat dengan memusatkan perhatian perhatian pada keterampilan/ vokasi.

Sasaran Program, Lembaga Penyelenggara dan Indikator Keberhasilan Program. Kriteria Sasaran Program KWD dan KWK Kriteria terhadap sasaran (warga belajar) adalah sebagai berikut: penduduk usia produktif (18 – 35 th), menganggur, mempunyai kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, prioritas berdomisili tidak jauh dari tempat penyelenggaraan program KWD/KWK, tidak dalam proses masih sekolah, diprioritaskan dari keluarga tidak mampu beasiswa disediakan untuk membelajarkan peserta didik yang lulus SMP/ sederajat, DO SMP/ SMK sederajat, dan lulus SMA/ SMK sederajat tidak lanjut, menganggur dan berasal dari keluarga miskin.

Penyelenggaraan program KWD dan KWK dilakukan oleh lembaga non formal dan informal baik itu milik pemerintah maupun swasta. Lebih jauh dijelaskan bahwa lembaga yang menerima Biaya operasional penyelenggaraan (BOP) KWD dan KWK adalah lembaga/ satuan pendidikan nonformal dan informal dengan cara kompetensi proposal. Dalam hal ini PKBM adalah termasuk satuan pendidikan nonformal dimana sangat strategis sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan program ini. Dengan kompetisi proposal diharapkan PKBM dapat bersaing dalam pemberdayaan masyarakat desa dan kota dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan.

Indikator keberhasilan program Kursus Wirausaha Desa dan Kota (Ditbansuslat, 2010; 15) dapat dilihat dari: (1) adanya laporan penyelenggaraan program dan keuangan, (2) Minimal 90% peserta didik menyelesaikan program pembelajaran KWD dan KWK sampai tuntas, (3) Minimal 80% lulusan berwirausaha (usaha mandiri) atau bekerja

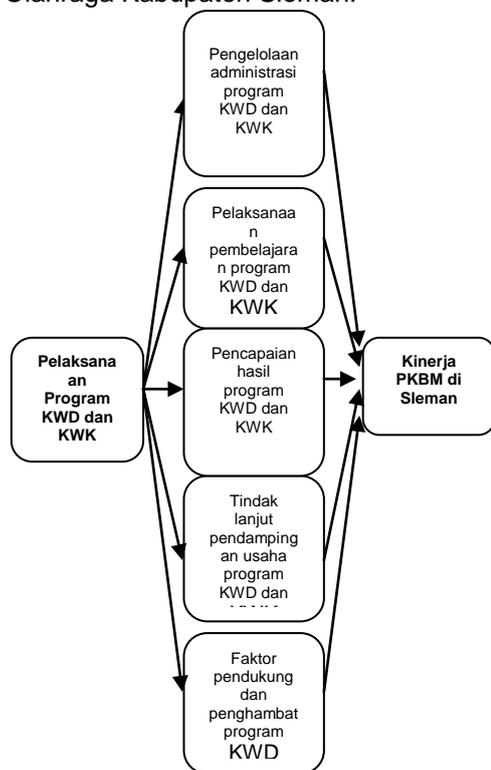
pada dunia usaha dan dunia industri (DU/DI).

Secara operasional, PKBM merupakan tempat di mana kegiatan PNFI dipusatkan pelaksanaannya dengan lokasi berada di tingkat kecamatan dan pedesaan. Syarat minimal dapat didirikan PKBM adalah: adanya gedung sekolah/gedung lainnya yang kosong dan tidak dimanfaatkan, minimal dapat digunakan selama 5 tahun, ada izin tertulis dari pihak berwenang, memiliki sekurang-kurangnya 2 lokal, letaknya mudah dijangkau oleh masyarakat dan adanya warga masyarakat yang akan dibelajarkan.

Indikator keberhasilan PKBM yang ditetapkan Depdiknas adalah: Keberhasilan pengelolaan, setiap hari ada kegiatan pembelajaran; Minimal diselenggarakan lima jenis kegiatan pembelajaran. Keberhasilan proses pembelajaran, meningkatkan peran serta warga belajar dan masyarakat sekitarnya, terciptanya suasana belajar yang kondusif, semakin meningkatnya kemampuan warga belajar dan warga masyarakat sekitar dalam mengelola sumber daya yang ada di lingkungannya atau sebagai mata pencaharian warga desa setempat. Semakin meningkatnya kualitas hidup warga belajar dan masyarakat sekitar PKBM.

Program PKBM dapat dilihat berdasarkan keberhasilan programnya yang terukur. Agar pengukuran keberhasilan program PKBM tersebut tepat dan dapat dipertanggungjawabkan, maka indikatornya harus jelas. Indikator tersebut selanjutnya dijadikan dasar penyusunan instrumen evaluasi diri penilaian program. Indikator tersebut adalah: 1) Pengelolaan administrasi yang terdiri atas akreditasi, pengelolaan dan pembiayaan. Pelaksanaan program yang terdiri atas kurikulum, proses pelajaran, pendidik, tenaga kependidikan, warga belajar dan sarana prasarana. Pencapaian tujuan terdiri atas penilaian, Follow up (tindak lanjut) terdiri atas citra lembaga, Penghambat dan pendukung terdiri atas faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan program. Sampel sebanyak 13 PKBM yang berada di Kecamatan Sleman, Mlati,

Gamping, Godean, Minggir, Tempel, Ngaglik, Depok, Prambanan yang mendapat dana bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) berdasarkan catatan dari Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Sleman.



Gambar 1. Kerangka Berfikir

Pengambilan data dalam penelitian ini : Angket digunakan untuk menjangkau data pengelola PKBM, Nara Sumber Teknik (NST)/ tutor, warga belajar, *stakeholder* dalam pelaksanaan program KWD dan KWK. Wawancara untuk menjangkau data pada pengelola PKBM untuk mengetahui kesiapan pengelolaan dalam pelaksanaan kursus KWD dan KWK. Model wawancara bersifat tertutup. Dokumentasi untuk mengetahui data-data tentang persiapan pengelola, identitas peserta, pengelola, kualifikasi tutor/ Nara Sumber Teknik (NST), laporan akhir, sukses story, laporan keuangan dll.

Data-data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif yaitu mendeskripsikan dan memaknai tiap-tiap komponen data evaluasi kemudian dibandingkan dengan acuan kriteria

yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan rata-rata ideal dan simpangan baku ideal yang dicapai oleh instrumen.

Tabel 1. Kreteria penafsiran efektivitas program

Nilai Skor	Interpretasi
$X \geq M_i + 1,5 SD$	Sangat Baik
$M_i + 0,5 < X < M + 1,5 SD$	Baik
$M_i - 0,5 SD < X < M_i + 0,5 SD$	Cukup Baik
$M_i - 1,5 SD < X < M_i - 0,5 SD$	Kurang
$X < M_i - 1,5 SD$	Sangat kurang

Keterangan:

M_i = rata-rata ideal komponen dalam penelitian, dengan rumus = $\frac{1}{2}$ (skor ideal tertinggi dalam komponen + skor ideal terendah).

SD = standartdeviasi ideal dalam setiap komponen penelitian, dengan rumus $1/6$ (skor ideal tertinggi dalam komponen – skor ideal terendah).

PEMBAHASAN

Hasil perolehan rerata skor pelaksanaan program kewirausahaan pada PKBM di Kabupaten Sleman, secara keseluruhan dapat diringkas pada tabel berikut ini.

Pembahasan, titik berat program KWD dan KWK adalah memberi pelayanan pendidikan keterampilan tertentu kepada warga belajar agar mampu membuka lapangan kerja dan atau diterima bekerja di DU/DI atau individu tertentu dan memperoleh penghasilan yang layak untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf hidupnya. Kerja sama dengan aparat pemerintah di tingkat desa, lembaga pembangunan desa dan tokoh-tokoh masyarakat, terfokus pada rekrutmen dan seleksi calon warga belajar serta pembinaan kelompok belajar yang berada di daerahnya. Kerjasama dengan instansi teknis dinas pemerintah daerah dan organisasi, perguruan tinggi,

lembaga kursus ditujukan untuk men-
jaring Nara Sumber Teknik (NST)/tutor,
sedangkan kerjasama dengan pengusa-
ha/perusahaan swasta terkait dengan
penempatan kerja, konsultasi teknis,
pemagangan dan pemasaran hasil
produksi. Belum baiknya proses

pembelajaran dikarena-kan pada PKBM
yang menyeleng-garakan program KWD
dan KWK terdapat tutor yang belum
punya berkualifikasi dan kompetensi
yang baik dan kurang mempunyai
kerjasama dengan instansi dan lembaga
kursus yang sesuai dengan bidang

Tabel 2. Ringkasan Hasil Penelitian

No	Variabel/ Indikator	Aspek	Sumber Data	Rerata Skor	Kategori
A. Pengelolaan Administrasi Program KWD dan KWK					
1.	Tingkat kebutuhan	Conteks	• Pengelola	2,808	Baik
2.	Dukungan Lingkungan	Conteks	• Pengelola	2,615	Cukup
3.	Penilaian kinerja	Input	• Pengelola	2,160	Kurang
4.	Pengelolaan	Proses	• Pengelola	2,353	Cukup
5.	Pembiayaan	Input	• Pengelola	2,207	Kurang
Total				2,331	Cukup
B. Pelaksanaan Pembelajaran Program KWD dan KWK					
1.	Kurikulum	Input	• Tutor/NST	2,052	Kurang
2.	Proses pembelajaran	Proses	• Pengelola • Tutor/NST	2,405 2,390	Cukup Cukup
3.	Nara sumber teknik (NST)/Tutor	Input	• Pengelola • Tutor/NST	2,410 2,345	Cukup Cukup
4.	Warga belajar	Input	• Warga Belajar	2,431	Cukup
5.	Tenaga kependidikan	Input	• Tutor/NST	2,117	Kurang
6.	Sarana dan prasarana	Input	• Pengelola • Tutor/NST	2,224 2,153	Kurang Kurang
Total				2,406	Cukup
C. Pencapaian Tujuan (Output) Program KWD dan KWK					
1.	Kecakapan hidup warga belajar	Produk	▪ Warga Belajar	2,312	Cukup
2.	Penempatan kerja dan membuka usaha	Produk	▪ Pengelola ▪ Tutor/NST ▪ Warga Belajar	2,410 1,845 2,239	Cukup Kurang Kurang
3.	Pencitraan/peng- akuan dari pihak luar (stakeholder)	Produk	▪ Stakeholder	1,282	Sangat Kurang
Total				2,176	Kurang
D. Tindak lanjut pendampingan program KWD dan KWK					
1.	Bentuk dan intensitas pendampingan	Produk	▪ Pengelola ▪ Tutor/NST	2,538 2,417	Cukup Cukup
2.	Hasil pendampingan usaha	Produk	▪ Pengelola ▪ Tutor/NST	2,352 2,042	Cukup Kurang
Total				2,338	Cukup

keterampilannya. Keberhasilan proses pembelajaran PKBM yang ditetapkan oleh Depdiknas adalah (1) meningkatkan peran serta warga belajar dan masyarakat sekitarnya, (2) terciptanya suasana belajar yang kondusif, (3) semakin meningkatnya kemampuan warga belajar dan warga masyarakat sekitar dalam mengelola sumber daya yang ada dilingkungannya atau sebagai mata pencaharian warga desa setempat, (4) semakin meningkatnya kualitas hidup warga belajar dan masyarakat sekitar PKBM.

Pelaksanaan program KWD dan KWK terdapat faktor pendukung dan penghambat yang merupakan kekuatan dan kelemahan program ini. Beberapa faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam program KWD dan KWK pada PKBM di Kabupaten Sleman, antara lain: (1) sumber daya manusia (SDM), (2) fasilitas (sarana dan prasarana), (3) pendanaan dan waktu, (4) dukungan pemerintah setempat dan masyarakat, dan (5) *stakeholders* (dunia usaha dan industri).

Berdasarkan pengumpulan data hasil penelitian pada aspek SDM baik itu pengurus PKBM, NST dan warga belajar dalam pelaksanaan program KWD dan KWK dari segi pemahaman program, meningkatkan kemampuan, pengalaman melaksanakan program merupakan faktor pendukung yang perlu dipertahankan. Mengingat PKBM sudah memprogramkan dan membuat satuan tugas dan job deskripsi yang jelas serta sanksi yang tegas baik dalam tingkat pengurus, tutor dan warga belajar.

Sedangkan faktor penghambat yang dialami oleh PKBM adalah (1) pengurus (PKBM): koordinasi intern dan ekstern organisasi masih kurang maksimal, kesibukan personil, dan ketergantungan kegiatan PKBM pada figur ketua dan beberapa pengurus tertentu. (2) NST/Tutor, kualitas penguasaan materi kurang karena hanya mengandalkan keterampilan alami, sibuk tutor dalam melakukan pekerjaan lain, (3) Warga Belajar, terdapat permasalahan: motivasi yang tidak konsisten, kendala penentuan waktu belajar, kecenderungan warga belajar yang serba ingin "instant" untuk

memperoleh penghasilan. Disamping itu faktor penghambat yang diterjadi adalah tidak semua warga belajar sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan oleh PNFI dimana warga belajar harus usia produktif 17 s/d 35 tahun, kurang beruntung, tidak mempunyai keterampilan dan miskin. Dalam kenyataannya warga belajar sudah usia 45 tahun ke atas yang merupakan usia tidak produktif lagi. Sedangkan ada beberapa warga belajar yang tidak dalam kategori miskin ikut dalam kursus KWD dan KWK.

Segi fasilitas sebagian besar hampir (70%) PKBM di Sleman mempunyai media cetak, media elektronik dan ruangan kantor yang cukup representatif dalam pelaksanaan kursus KWD dan KWK. Fasilitas ini merupakan faktor pendukung yang cukup baik dalam pelaksanaan KWD dan KWK. Faktor penghambat dalam aspek ini adalah PKBM masih belum banyak memiliki buku-buku panduan yang cukup serta akses internet yang belum lengkap sehingga mengganggu jalannya suatu program.

Pada uraian tentang faktor dana dan waktu dapat berlaku sebagai faktor pendukung maupun sebagai faktor penghambat. Faktor pendukungnya karena dengan adanya dana yang diberikan oleh pemerintah maka jalannya kursus KWD dan KWK berjalan dengan baik. Sedangkan minimnya dana dan terlambatnya pengiriman dana yang dialokasikan dan dijadwalkan dapat menjadi penghambat. Dana dapat berlaku sebagai faktor pendukung kegiatan, karena setiap kegiatan membutuhkan dana. Dalam hal ini, dana bantuan pemerintah mempunyai arti penting bagi kelanjutan program KWD dan KWK. Tetapi, minimnya dana juga menjadi faktor penghambat kegiatan. Misalnya tidak setiap proposal yang diajukan dengan nilai tertentu dikabulkan bahwa ada yang dipotong 50% dengan jumlah warga belajar yang sama. Honor tutor yang kecil menjadi sebab motivasi melaksanakan kegiatan "naik-turun". Identifikasi dana sebagai faktor penghambat proses: (1) kurang dukungan APBN/D akibat minimnya anggaran yang dialokasikan untuk program ini menye-

babkan kuota dan dana stimulan terbatas; (2) sedikitnya honor tutor, (3) banyak warga belajar kurang mampu sehingga tidak dapat memenuhi kesempatan iuran, (4) sulit mendapat dana dari sumber lain.

Dukungan dari pemerintah dan warga masyarakat sekitar pada semua PKBM yang menyelenggarakan kursus KWD dan KWK rata-rata mendapat dukungan yang baik dari pemerintah desa dan masyarakat setempat. Namun masih terdapat warga masyarakat yang kurang mengetahui kegiatan KWD dan KWK. Beberapa jenis keterampilan tidak berhasil karena kendala pasangsurutnya dunia usaha, yang berarti ide yang dijalankan kurang sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Jaringan pemasaran, kerja sama dengan pengusaha dan pemerintah desa belum maksimal. PKBM hanya sekali menyalurkan dana stimulan, kemudian masing-masing warga belajar program KWD dan KWK "dibiarkan" berkembang sendiri tanpa pendampingan yang maksimal.

Beberapa kendala ditemukan, antara lain pengawasan, pemantauan, dan pendampingan yang kurang maksimal dari PKBM. Sehingga setelah modal awal diberikan, para coordinator program KWD dan KWK menjalankan kegiatan tersebut sendiri. "Pembinaan" ini menurut pengurus PKBM karena mengingat keterbatasan personil dan dimaksudkan untuk mendorong kemandirian bagi warga belajar untuk mengembangkan diri. *Stakeholder* pengembangan kegiatan belum maksimal, misalnya stakeholder pemasaran produk dan kerja sama dengan pihak pengusaha. Pencairan dana KWD dan KWK dilakukan setelah proposal disetujui Dinas Pendidikan Propinsi DI Yogyakarta, dan diserahkan dalam bentuk *block grant*. Hal ini menandakan bahwa keberlangsungan PKBM masih tergantung dari dana *block grant* yang diberikan Pemerintah, sementara sumber pendanaan yang lain belum tergal.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan adalah sebagai berikut:

Pengelolaan administrasi program, Pelaksanaan program KWD dan KWK pada PKBM di Kabupaten Sleman berada pada kategori cukup.

Pencapaian tujuan (*output*) program dalam kategori kurang, Tindak lanjut pendampingan program KWD dan KWK pada PKBM di Kabupaten Sleman berada pada kategori cukup.

Faktor pendukung program adalah aspek pemahaman program, meningkatkan kemampuan dan pengalaman menyelenggarakan. Fasilitas 70% PKBM di Sleman sudah mempunyai media elektronik (computer) dan ruangan kantor yang cukup representatif. Selanjutnya adanya dana block grant yang diberikan pemerintah.

Faktor penghambatnya adalah pengurus PKBM yang kurang koordinasi, ketergantungan pada figur ketua dan beberapa pengurus tertentu, tutor yang kurang menguasai materi, motivasi yang rendah dari warga belajar, serta warga belajar yang ikut program sudah tidak berusia produktif lagi, PKBM yang belum punya jaringan akses internet dan buku-buku panduan. Minimnya dana stimulan untuk membuka usaha, honor tutor yang kecil, sulitnya mencari sumber dana dari tempat lain.

Saran

Mengacu pada kesimpulan serta berdasarkan tujuan dan kegunaan penelitian, beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain:

Penelitian menyimpulkan bahwa pencitraan/pengakuan dari pihak luar (*stakeholder*) berada pada kategori sangat kurang. Oleh karena itu perlu adanya dukungan dari pihak luar terutama dunia usaha dan dunia industri (DU/DI) dalam kerjasama dalam pelaksanaan KWD dan KWK yang dijalankan oleh PKBM. Sedangkan PKBM sendiri harus bersikap aktif mencari mitra dengan memakai warga belajar (lulusan) setelah selesai mengikuti kursus.

Perlu adanya tindak lanjut pendampingan program KWD dan KWK dalam bentuk membuka kelompok wirausaha baru yang selama jangka waktu tertentu dibina oleh PKBM. Karena selama program berjalan tidak semua

PKBM melakukan pembinaan dalam membuka wirausaha baru bagi warga belajar. Sehingga pada akhirnya setelah selesai program berjalan warga belajar akan bekerja sesuai dengan kebiasaan sebelumnya.

Pihak pemerintah desa dan penilik PNFI kecamatan dalam pelaksanaan program KWD dan KWK perlu adanya perhatian khusus misalnya membantu memberikan saran dan dukungan kerjasama terhadap pihak industry yang ingin mencari tenaga kerja.

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat pembinaan kursus dan kelembagaan, 2008. Pedoman program kursus wirausaha kota (KWK). Jakarta. Dirjen PNFI Depdiknas.

Direktorat pembinaan kursus dan kelembagaan, 2008. Pedoman program kursus wirausaha Desa (KWD). Jakarta. Dirjen PNFI Depdiknas.

Direktorat pembinaan kursus dan pelatihan. 2011. Petunjuk teknis penyelenggaraan program dan dana bantuan social, pendidikan kewirausahaan masyarakat (PKM). Jakarta. Kemendiknas.

Moerdiyanto, dkk. 2010. *Naskah akademik penilaian kinerja lembaga kursus dan pelatihan ditsuskel, ditjen PNFI, kemendiknas RI*. Jakarta. Dirjen PNFI Kemendiknas RI.

Moerdiyanto. (2009). Pedoman praktik kewirausahaan untuk lembaga pendidikan. Tidak diterbitkan. Yogyakarta. Direktorat tenaga kependidikan Depdiknas.